

Kegiatan Insentif dan Penyelamatan Sapi dan Kerbau Betina Produktif di Sumatera Barat tahun 2011-2012

Incentif Activities and Rescue of Productive Female Cattle and Buffaloes In West Sumatera on 2011-2012

F. Madarisa¹, Edwardi² dan A. Arman²

¹Fakultas Peternakan Universitas Andalas Padang

²Dinas Peternakan Sumatera Barat.

e-mail: fmadarisa@yahoo.com. hp : 08126604713

(Diterima: 3 Desember 2012, Disetujui: 2 Februari 2013)

ABSTRACT

A survey has been conducted to observe the activity of delivering budget scheme to livestock farmers groups in West Sumatra 2011-2012. Its objective was to prevent both productive cow and buffalo from slaughtering process. Within a system approach, at least two activities have been launched to deal with such prevention program; (1) incentive budget as a driving force to keep livestock living at farmers groups and (2) getting back productive cow and buffalo from intended marketing chains. A designed questioner has been offered to 146 farmers groups to collect primary data. Secondary data was collected from related publications. The result showed that incentive was more effective and efficient compared to the get back productive cow. Thus, it is recommended that incentive budget should be continued with a social business approach in its market system. A number of activities could be followed to achieve such goals; (1) farmer groups activity as a main basis for incentive program; (2) making sure that groups could finalize the activity at the earlier process to keep farmers motivation high; (3) increasing both budget allocation and number of target recipient to the incentive activity.

Keywords: budget incentive, productive cow and buffalo, meet self sufficient effort.

PENDAHULUAN

Kegiatan pemberian insentif dan upaya penyelamatan pada ternak sapi dan kerbau betina produktif (IPBP) adalah bagian dari program swasembada daging tahun 2014. IPBP bertujuan untuk menyelamatkan ternak betina produktif dari pemotongan. IPBP bekerja untuk mencegah tingkat penurunan populasi, yang pada gilirannya berkontribusi bagi swasembada (Kementan 2010). Kemudian, pola pendanaan IPBP berubah dari pola bantuan sosial (bansos), sebab pola bansos khusus untuk memfasilitasi kelompok masyarakat miskin.

Pelaksanaan IPBP tersebut terdiri dari dua sub kegiatan; (a) insentif, yakni memberikan dana kepada peternak yang memiliki sapi/kerbau betina bunting untuk tetap dipelihara sampai beranak dan akhir usia produk-

tif, (b) penyelamatan, ialah upaya mencegah sapi/kerbau produktif dari pemotongan. Lokasi tindak pencegahan berlangsung di kelompok peternak, pasar, RPH dan TPH. Sasaran IPBP adalah: (1) memberikan penghargaan / insentif kepada peternak yang memiliki sapi/kerbau betina produktif yang bunting lebih dari 5 bulan; (2) termotivasinya peternak dan kelompok untuk mengembang biakan sapi/kerbau betina produktif dan melakukan usaha pembibitan; (3) tercapainya keseimbangan struktur populasi sapi/kerbau anak, muda, dewasa dan jantan betina di tingkat nasional dan daerah, sehingga dapat meningkatkan populasi sapi /kerbau secara bertahap; dan (4) tegaknya peraturan sebagai diamanatkan dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, khususnya untuk pencegahan pemotongan betina produktif.

IPBP juga menampakan tingkat perhatian pada pengembangan ternak kerbau membaik. Sebab, sejak tahun 2011, swasembada daging sapi berkombinasi dengan kontribusi dari daging kerbau. Maka, alokasi anggaran mendukung pengembangan bagi ternak sapi dan kerbau meningkat. Misalnya tahun 2011, Sumatera Barat mendapatkan alokasi pada 17 kabupaten/kota sebagai daerah IPBP. Jumlah ini terdiri dari 52 kelompok insentif dan 32 kelompok penyelamatan. Sedang pada tahun 2012 ada sebanyak 49 kelompok (Disnak Sumbar; 2012).

Bagaimana pelaksanaan pemberian IPBP pada kelompok peternak di provinsi Sumatera Barat. Pada kategori mana pelaksanaan IPBP berjalan dengan efektif. Kalau begitu, bagaimana masa depan pemberian insentif dan penyelamatan betina produktif terhadap peternak, kelompok dan masyarakat sekitarnya. Apa saja prioritas kebijakan yang perlu dilakukan. Untuk mengetahui posisi pelaksanaan IPBP dilakukan pencermatan, yang bertujuan untuk menilai penyelenggaraan kegiatan IPBP di Sumatera Barat tahun 2011-2012. Kemudian, menyusun arah untuk perbaikan pelaksanaan IPBP tahun mendatang.

METODE PENELITIAN

Metode pengambilan data untuk mengetahui pelaksanaan IPBP diselenggarakan dengan dua cara. *Pertama*, pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan dan diajukan kepada kelompok penerima IPBP. Pengurus kelompok, sebelumnya dilatih untuk mengisi kuisioner. Ada 100 kelompok penerima insentif dan 46 kelompok penerima penyelamatan selama tahun 2011-2012. *Kedua*, pengumpulan data sekunder berasal dari aneka publikasi dan rencana kegiatan Dinas Peternakan Propinsi Sumatera Barat.

Perhitungan dan analisa data dilakukan dengan statistik sederhana berupa penjumlahan dan persentase. Analisa diselenggarakan dengan membandingkan antara target dan realisasi, serta memberi makna atas fakta yang

tersedia. Kemudian membandingkan realita dengan teori dan konsep kebijakan yang hendak diambil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan kegiatan IPBP tahun 2011-2012 mencakupi tiga bagian; (1) perkembangan pelaksanaan kegiatan insentif dan penyelamatan betina produktif, (2) asumsi dan dasar berpijak pengambilan kebijakan IPBP, dan (3) strategi kebijakan untuk pemberian insentif dan penyelamatan kedepan.

Kegiatan insentif dan penyelamatan.

Cara untuk memandang pemberian insentif (I) dan penyelamatan (P) sapi/kerbau betina produktif merupakan sebuah kesatuan atau 'sistem'. I dan P adalah unsur yang saling berinteraksi dalam sistem. Maka, perubahan I mempengaruhi P, dan sebaliknya.

Tabel 1 menampakan perkembangan pemberian insentif (I) semenjak tahun 2011. Meski jumlah kelompok penerima turun 4 %, terjadi perkembangan yang bertolak belakang antara lokasi kota dan kabupaten. Kelompok di kota bertambah jumlahnya, sedang di Kabupaten menurun. Penurunan di Kabupaten cenderung berlangsung seputar daerah perbatasan propinsi. Sehingga perkembangan pemberian insentif lebih memusat ke Kabupaten didaerah dataran tinggi bagian tengah. Terjadi tumpang tindih fokus antara daerah padat penduduk dan padat ternak.

Penambahan jumlah kelompok penerima perkotaan hanya terjadi di Padang. Padahal kota kota di daerah tengah justru menurun. Kecuali Pasaman Barat, kelompok di kota dan kabupaten memang saling berseberangan tingkat perkembangannya. Begitu pula antara daerah tengah dengan perbatasan, dataran tinggi, dan daerah dataran rendah/pantai.

Walau realisasi kelompok turun 4% dari tahun 2011-2012, target insentif hanya turun sebesar 1%. Kecenderungan perkembangan jumlah penerima insentif berhubungan paralel dengan kelompok. Artinya pemusatan dan penambahan penerima di bagian tengah propinsi diiringi oleh targetnya. Kemudian, kota mengalami peningkatan target insentif. Hal

Tabel 1. Target dan Realisasi Pemberian Insentif pada Sapi / Kerbau Betina Produktif di Sumatera Barat

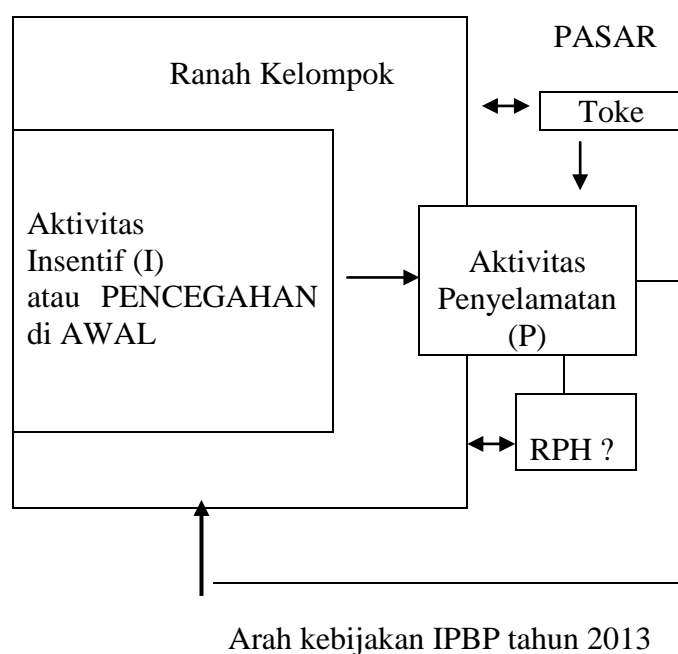
No.	Kabupaten / Kota	Jumlah Kelompok (bh)			Target Insentif (ekor)			Jumlah Kelahiran (ekor)								Total
		2011	2012	Perubahan (%)	2011	2012	Perubahan (%)	2011				2012				
								Jtn	Btn	Jumlah	Realisasi (%)	Jtn	Btn	Jumlah	Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Kabupaten																
1	Lima Puluh Kota	3	4	33	960	1300	35	481	479	960	960	0	0	0	0	960
2	Agam	5	6	20	1600	2010	26	668	785	1453	1453	195	168	363	363	1816
3	Dharmasraya	4	3	-25	1280	1020	-20	568	649	1217	1217	19	28	47	47	1264
4	Padang Pariaman	7	3	-57	2240	960	-57	1198	1042	2240	2240	8	11	19	19	2259
5	Pasaman	2	2	0	640	640	0	272	368	640	640	121	80	201	201	841
6	Pasaman Barat	2	3	50	640	1020	59	368	292	660	660	202	235	437	437	1097
7	Pesisir Selatan	4	3	-25	1280	960	-25	485	794	1279	1279	0	0	0	0	1279
8	Sijunjung	3	3	0	960	1050	9	431	469	900	900	166	170	336	336	1236
9	Solok	3	3	0	969	960	-1	498	471	969	969	0	0	0	0	969
10	Solok Selatan	4	2	-50	1280	640	-50	258	463	721	721	87	57	144	144	865
11	Tanah Datar	7	9	29	2240	2880	29	1157	1083	2240	2240	419	490	909	909	3149
Sub-Total		44	41	-7	14089	13440	-5	6384	6895	13279	13279	1217	1239	2456	2456	15735
Kota																
12	Padang Panjang	1	0	-100	320	0	-100	50	120	170	170	0	0	0	0	170
13	Padang	2	5	150	640	1700	166	164	476	640	640	248	576	824	824	1464
14	Solok	1	0	-100	320	0	-100	100	140	240	240	0	0	0	0	240
15	Payakumbuh	2	2	0	640	652	2	301	335	636	636	0	0	0	0	636
16	Sawahlunto	1	1	0	320	320	0	121	172	293	293	0	0	0	0	293
Sub-Total		7	8	14	2240	2672	19	736	1243	1979	1979	248	576	824	824	2803
TOTAL		51	49	-4	16329	16112	-1	7120	8138	15258	15258	1465	1815	3280	3280	18538

Sumber : Diolah dari Laporan Kelompok (Oktober 2012)

Tabel 2. Target dan Realisasi Penyelamatan Sapi / Kerbau Betina Produktif Sumatra Barat

No.	Kabupaten / Kota	Jumlah Kelompok (bh)			Lokasi Penyelamatan								Total Penyelamatan (ekor)
		2011	2012	Perubahan (%)	2011				2012				
					RPH	Toke	Kelompok	Jumlah	RPH	Toke	Kelompok	Jumlah	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Kabupaten													
1	Lima Puluh Kota	2	1	-50	0	67	29	96	6	0	0	6	102
2	Agam	2	2	0	0	24	96	120	1	26	9	36	156
3	Dharmasraya	2	1	-50	0	66	54	120	0	14	3	17	137
4	Padang Pariaman	3	1	-67	0	110	30	140	0	19	0	19	159
5	Pasaman	2	1	-50	0	20	80	100	16	4	10	30	130
6	Pasaman Barat	2	1	-50	9	85	6	100	8	14	13	35	135
7	Pesisir Selatan	3	1	-67	0	160	36	196	0	25	0	25	221
8	Sijunjung	2	1	-50	0	77	26	103	5	21	0	26	129
9	Solok	3	1	-67	0	84	52	136	0	3	27	30	166
10	Solok Selatan	2	1	-50	0	0	89	89	0	0	11	11	100
11	Tanah Datar	2	1	-50	3	18	75	96	0	0	53	53	149
Sub-Total		25	12	-52	12	711	573	1296	36	126	126	288	1584
Kota													
12	Bukittinggi	1	0	-100	0	20	20	40	0	0	0	0	40
13	Padang	2	1	-50	38	33	31	102	0	21	21	42	144
14	Solok	1	1	0	0	36	2	38	3	16	16	35	73
15	Payakumbuh	2	0	-100	0	53	39	92	0	0	0	0	92
16	Sawahlunto	1	0	-100	21	3	14	38	0	0	0	0	38
Sub-Total		7	2	-71	59	145	106	310	3	37	37	77	387
TOTAL		32	14	-56	71	856	679	1606	39	163	163	365	1971

Sumber : Diolah dari Laporan Kelompok (Oktober 2012).



Gambar 1. Peta Konsep Pemikiran dan Arah Kebijakan IPBP

Hal ini juga menggambarkan kelengkapan laporan administrasi. Sebab ada kebijakan reward dan punishment bagi kabupaten/kota yang cepat bergerak memberi laporan.

Laporan realiasi kelahiran anak pada ternak yang mendapat insentif tahun 2011 sudah berjalan 100%. Hanya saja target insentif dibandingkan dengan kelahiran tidak tercapai. Sumbangan yang tidak terealisasi

Ada dua penyebab tidak tercapainya target, (1) kematian pada anak dan induk; (2) terjadinya potong paksa pada induk. Dengan itu, perlu perhatian dan upaya perbaikan pada: (a) pakan, (b) pengelolaan / pemeliharaan, dan (c) proses kelahiran. Bila dilihat perbandingan kelahiran, ternyata anak betina lebih banyak. Hal ini lebih menguntungkan, sebab merupakan bakal indukan akan lebih banyak juga.

Realisasi kelahiran pada tahun 2012 belum mencapai target, sebab data tersedia sampai bulan Oktober 2012. Sehingga, memang waktu untuk memenuhi target masih ada selama lebih dari 60 hari. Namun, melihat laporan perkembangan realisasi, daerah kota cenderung lebih lama memberikan laporan ketimbang kabupaten. Hanya kabupaten 50 Kota dan Solok yang masih belum ada data-

nya. Sedangkan di kota, hanya Kota Padang yang telah memasukan laporan.

Aktivitas penyelamatan (P) betina produktif tercantum pada Tabel 2. Pola umumnya, terjadi penurunan jumlah kelompok dan realisasi (P) dari tahun 2011 ke 2012, kecuali di Kabupaten Agam dan Kota Solok. Kabupaten Agam menyukai penyelamatan (P) dibandingkan dengan insentif (I). Terlihat bahwa Agam cenderung menjadi daerah pasar (yang berwatak cepat dan efisien) ketimbang lokasi budidaya atau pemeliharaan. Terjadinya penurunan dan sebaliknya peningkatan jumlah I atau P tahun 2011 dan 2012, merupakan akibat dari kebijakan 'reward and punishment' sebab daerah yang memberi laporan administrasi cepat, mendapat penghargaan dengan penambahan jumlah target pada tahun berikutnya, termasuk dananya.

Lokasi penyelamatan (P) terjadi pada tiga kategori; RPH, toke dan kelompok. Terlihat bahwa penyelamatan banyak terjadi pada pedagang dan kelompok. Sedang pada RPH dan TPH hanya sedikit yang terselamatkan (4,43%). Itupun lebih banyak di RPH perkotaan. Walau belum semua RPH kota yang melakukan (P) nya.

Tingkat penyelamatan antara pedagang/toke dengan kelompok nampak berimbang, meski sedikit lebih besar pada pedagang. Kendati terjadi penyelamatan disemua lokasi, namun perlu perhatian kepada pedagang/toke pada tiga kabupaten; Pesisir Selatan, Padang Pariaman dan Kabupaten Solok. Sebab tiga lokasi ini menyumbangkan angka penyelamatan tinggi.

Kelompok melakukan aktivitas penyelamatan (P) sekaligus insentif (I). Artinya I dan P tumpang tindih di kelompok. I berada pada tahap awal, yang dikenal dengan tindak pencegahan (preventif). P berada pada tahap akhir, yang disebut dengan kuratif, ini terjadi di kabupaten Agam, Dharmasraya, Pesisir Selatan, Sijunjung dan Solok Selatan, kemudian pada semua kota, kecuali Padang. I dan P adalah sebuah sistem, maka kelompok harus menjaga kedua aktivitas itu. Dasar kelompok bekerja adalah Pasar. Peta konsep pemikiran dan arah kebijakan IPBP disajikan pada Gambar 1.

Merujuk pada data Tabel 1 dan 2, terlihat perbedaan yang mencolok (9:1) antara hasil insentif dan penyelamatan. Selama dua tahun terakhir kelahiran anak dari aktivitas insentif mencapai 18.538 ekor. Sedangkan hasil aktivitas penyelamatan dalam kurun waktu yang sama hanya 1.971 ekor. Aktivitas (I) menghasilkan anak, dan (P) mencegah penyembelihan betina produktif, namun perbandingan kinerja I dan P dengan ukuran jumlah sapi amat berbeda nyata. Padahal tujuan program IPBP adalah untuk menambah jumlah ternak. Apakah tidak lebih jitu untuk memusatkan pada aktivitas insentif (I) dibanding penyelamatan (P).

Ketika memperhatikan dukungan dan alokasi sumberdaya, khususnya jumlah rupiah pada kedua aktivitas, hasilnya lebih nyata sebab tiap kelompok insentif mendapatkan dana sebesar Rp 200 juta. Sedangkan satu kelompok penyelamatan meraih dana sebanyak Rp 500 juta. Maka, 100 kelompok insentif membutuhkan dana sebanyak Rp 20 milyar. Sedangkan 46 kelompok penyelamatan menghabiskan biaya sebesar Rp 23 milyar. Jadi, akan mendapat tanda tanya saat membanding-

kan antara besar dana dengan hasil kinerja. Dengan biaya lebih besar, kelompok lebih sedikit, ternyata hasilnya ialah (9:1), sehingga menjadi dilema aplikasi program tidak efisien.

Selanjutnya dicermati pula kerumitan pekerjaan. Insentif hanya kegiatan kelompok baik ke dalam atau sekitar lokasi pemeliharaan. Pengurus kelompok dan Disnak tidak bekerjasama dengan toke, petugas pasar ternak dan RPH, seperti pada penyelamatan. Maka, jumlah waktu, jarak lokasi, alokasi biaya, tenaga dan pikiran, serta kapasitas mengkoordinasikan lebih kompleks pada aktivitas penyelamatan, sehingga I lebih efektif dari P.

Pertanyaannya adalah; dengan insentif (1) lebih banyak hasilnya (sembilan kali) dari jumlah sapi penyelamatan, (2) biaya yang lebih kecil (20 vs. 23 milyar), (3) jumlah kelompok dua kali lebih banyak, (4) tingkat kerumitan dan efisiensi lebih baik, bukankah kebijakan IPBP tidak lebih jitu tertuju pada aktivitas insentif (I). Jadi, dengan cara pandang sistem, maka: (1) aktivitas Insentif mesti menjadi agenda utama IPBP, yang berada di kelompok, dan (2) aktivitas penyelamatan dapat dihentikan, karena tidak efektif dan efisien.

Hasil penelusuran ke kelompok peternak umumnya juga mendukung I dibanding P. Mereka menyatakan bahwa insentif membuat peternak senang sebab mereka mendapat uang tunai penambah biaya pembelian pakan. Insentif juga menambah semangat dan ransangan dalam beternak. Efek berganda insentif adalah membuka peluang kerja bidang pengadaaan rumput dan sagu. Tantangan yang muncul justru pada waktu pemeriksaan kebuntingan yang tidak tepat. Keterlambatan pemeriksaan akan memundurkan saat mereka mendapat insentif.

Asumsi dan dasar kebijakan. Bagaimana cara memandang pemberian insentif dan penyelamatan sapi/kerbau betina produktif dalam sistem terpadu? Sebab strategi program cIPBP kedepan berpijak pada tiga asumsi ini; (1) Pertimbangan kebijakan untuk perbaikan taraf kehidupan peternak yang layak mengatasi kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Ini mesti diselenggarakan dari awal, (2)

Pembangunan pertanian, khususnya peternakan rakyat berskala kecil, tidak bisa bersaing dengan pasar komersil dan lintas negara (Roling dan Jiggins 2007). Pemerintah wajib melakukan kebijakan, terutama pada pasar yang memihak kepada usaha rakyat, dan (3)

Peran pasar semacam itu mesti ramah dengan memasukan aspek bisnis sosial. Pasar punya struktur etika dan keterbukaan yang perlu dukungan dari kejujuran sosial. Hal ini wajib direncanakan dari awal, melalui aplikasi kebijakan.

Tabel 3. Ringkasan Sistem Insentif dan Penyelamatan Sapi/kerbau betina produktif

No.	Kategori	Insentif (I) dan Penyelamatan (P) Sapi/kerbau Betina Produktif	
		Insentif	Penyelamatan
1	Tujuan	memberi insentif (Rp 500.000,-) pada peternak yang memiliki sapi/ kerbau betina bunting untuk tetap dipelihara sampai beranak dan akhir usia produktif.	menyelamatkan sapi/kerbau produktif dari pemotongan, khususnya di kelompok peternak, pasar, rumah potong hewan.
2	Pelaku	Kelompok peternak	Kelompok peternak,(toke ternak, petugas RPH)
3	Lokasi	Tempat pemeliharaan ternak	Tempat pemeliharaan ternak, pasar dan rumah potong.
4	Posisi	Tindak pencegahan (diawal)	Tindak penyelamatan (diakhir)
5	Tantangan	<ul style="list-style-type: none"> → Respon peternak sulit ditunda dan ditolak. Sebab, target insentif kecil. → Perlu upaya menjaga semangat tinggi untuk beternak. → Kelirunya dukungan kebijakan untuk kegiatan IPBP. 	<ul style="list-style-type: none"> → Harga relatif lebih mahal di toke, pasar dan RPH. → Perlu cakap bernegosiasi dengan toke dan petugas RPH → Perlu cepat untuk mengakses informasi dan harga pasar. → Watak 'koordinasi' lebih menonjol
6	Strategi dan langkah kerja kedepan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelompok tetap menjadi pelaku utama program IPBP. 2. Pastikan kegiatan IPBP di kelompok berjalan lancar. 3. Mencegah diawal (insentif) lebih baik ketimbang menyelamatkan diakhir. Sebab, peternak langsung mendapat dana dari ternak yang masih mereka pelihara. 4. Alokasi pembiayaan dan jumlah target insentif ditingkatkan. 	<p>JIKA TIDAK DIHENTIKAN, maka;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedagang dan petugas RPH menjadi pelaku dan mitra pelaksanaan kegiatan 2. Perlu fasilitasi petugas RPH dan toke dengan kelompok untuk memelihara ternak yang terselamatkan. 4. Pilih kelompok yang berlokasi seputar pasar ternak dan RPH. 5. Jumlah biaya mesti dikurangi.

Sumber : Hasil penelitian IPBP (2012)

Diharapkan nantinya adalah: (1) rendahnya harga ternak dan ditentukan toke bisa sedikit terobati dengan program IPBP, (2) insentif mampu mengatasi kebutuhan peternak yang mendadak, sambil tetap adanya jaminan keuntungan bagi peternak pemelihara, sehingga (3) semangat beternak terjaga, saat aliran manfaat insentif (I) tetap tersedia. Akerlof (2001) menyatakan bahwa hal pokok dalam ilmu ekonomi, yang mesti sebagai ilmu (tingkah laku) ialah “ekonomi makro”. Saya menyatakan bahwa ‘berbalas-balasan, keadilan, identitas, ilusi uang, kehilangan dendam, dan kelompok, membantu mengungkapkan menjauhnya ekonomi riil dari model kompetisi dan kesetimbangan umum. Akibatnya, ekonomi makro wajib didasarkan kepada pertimbangan perilaku itu.

Strategi kebijakan dan langkah kerja program IPBP kedepan berangkat dari asumsi kebijakan dan fakta perkembangan pelaksanaan I dan P. Kemudian kerangka kerja kebijakan yang bertumpu pada fakta dan teori ekonomi makro itu. Maka, tindak lanjut aktivitas IPBP pada tahun 2013 ke depan dapat dilihat pada Tabel 3. Khususnya pada poin lima (5) tantangan dan enam (6) strategi dan langkah kerja kedepan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan pemberian Insentif dan Penyelamatan sapi dan kerbau Betina Produktif (IPBP) tahun 2011-2012 di Sumatera Barat dipandang sebagai satu sistem. Sehingga perubahan pada satu unsur berpengaruh pada unsur lainnya. Pelaksanaan IPBP menunjukkan tindak insentif lebih efisien dan efektif ketimbang penyelamatan. Sehingga dasar kegiatan dan kebijakan IPBP kedepan, adalah lebih memusatkan pada insentif, meskipun interaksi berangkat dengan pendekatan pasar. Hanya saja pasar itu perlu ramah kepada peternak melalui adanya agenda sosial.

Strategi untuk melaksanakan prioritas insentif dengan basis pasar sosial ialah; (1) Menempatkan kelompok peternak untuk tetap menjadi pelaku utama program IPBP, (2) Memastikan bahwa kegiatan IPBP yang fokus pada insentif berjalan lancar di kelompok, (3) Upaya untuk mencegah di awal (insentif) lebih baik dari pada proses menyelamatkan diakhir. Apalagi, peternak langsung men-

dapatkan dana dari ternak yang masih mereka pelihara. Hal ini menambah semangat untuk bekerja. Karena hasil jerih payah peternak dalam memelihara, langsung mereka pula yang menikmatinya, bukan rantai agribisnis. (4). Jadi dukungan pembiayaan dan jumlah target untuk insentif perlu ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akerlof, George. 2001. Behavioral Macroeconomics and Macroeconomics Behavior. Nobel Prize Lecture, December 8, 2001. Department of Economics, University of California, Berkeley, CA 94720-3880.
- Disnak Sumbar 2012. Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif tahun 2012. Dinas Peternakan Sumatera Barat. Padang.
- , 2012. Laporan Pemberian Insentif dan Penyelamatan Betina Produktif (IPBP) bagi ternak sapi dan kerbau, ditengah masyarakat. Dinas Peternakan Sumatera Barat. Padang.
- Kementrian Pertanian Republik Indonesia. 2010. Pedoman Umum Program Swasembada Daging Sapi 2014. Direktorat Jendral Peternakan Republik Indonesia. Jakarta.
- Korten, David. 1980. Community Organization and Rural Development: A Learning Process Approach. Public Administration Review. September/ October 1980; 480-511.
- Prijono, Heri. 2004. Epilog: Sesudah Azas Tunggal dalam Keadilan Sosial; Upaya mencari makna kesejahteraan bersama di Indonesia. Penerbit buku Kompas. Jakarta.
- Röling, Niels dan Janice Jiggins. 2007. Making Trans-disciplinary Science Work for Resource-poor Farmers. Paper at Workshop Farmers First

Revisited. Brighton 12-14 December 2007.

Sumberg, James dan Gountiéni Damien Lankoandé. 2011. Heifer-in-trust, Social Protection and Graduation: Conceptual Issues and Research Questions. Working Paper number 024. Centre for Social Protection. Future Agriculture.

Said, Syahrudin. 2011. Animal Husbandry

Technology and Practice Improvement to Accelerate Meat and Milk Production. Makalah pada pertemuan stakeholders Rumah Potong Hewan (RPH) modern Payakumbuh, di Padang. 26 November 2011.

Yunus, Muhammad. 2011. Bisnis Sosial; Sistem Kapitalisme Baru yang Memihak Kaum Miskin. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta